

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

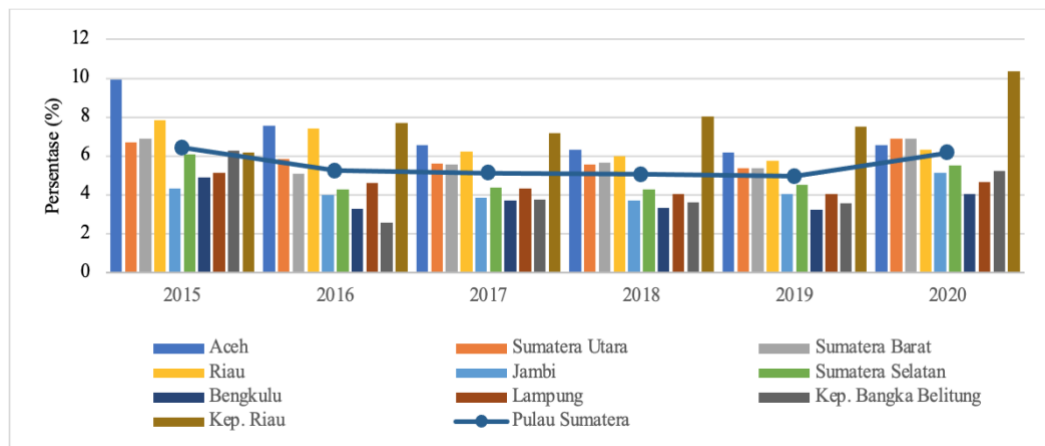
Berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, Indonesia digolongkan sebagai negara yang masih berkembang. Sebagai negara berkembang tentunya masih banyak permasalahan yang butuh untuk di selesaikan. Salah satu permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan yang ditemui di Indonesia adalah pengangguran. Indonesia saat ini berada pada peringkat kesepuluh dari daftar tingkat pengangguran negara G20 dengan tingkat pengangguran pada tahun 2021 sebesar 6,49% (Pahlevi, 2021). Pengangguran merupakan gambaran bahwa produktivitas masyarakat Indonesia masih rendah akibat dari terhambatnya dalam memperoleh kesempatan kerja. Faktor Jumlah penduduk yang banyak, penyebaran penduduk yang tidak merata serta struktur umur akan menambah jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran menjadi meningkat jika tidak terserap oleh lapangan kerja (Syaikhul Adlan, 2015).

Pengangguran merupakan permasalahan makro yang dampaknya mengganggu kestabilan ekonomi dan bisa membuat standar kehidupan dari seorang menurun. Dalam pernyataan Keynes, pengangguran disebabkan rendahnya *agregat demand* yang diakibatkan dari daya beli masyarakat yang juga rendah. Saat keadaan penawaran tenaga kerja tinggi akan membuat upah menjadi turun, sehingga akan menimbulkan kerugian karena dengan menurunnya upah akan berakibat daya beli masyarakat menurun. Salah satu parameter terciptanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah daya beli masyarakat, serta daya beli yang rendah juga menjadi cerminan bahwa PDRB akan menurun karena daya beli merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dari hal tersebut akan membuat produsen mengalami kerugian karena mengurangi kapasitas produksi sehingga tidak bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak (Suhendra & Wicaksono, 2016).

Pengangguran terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia, berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi berdasarkan kepulauan

besar di Indonesia berada di Pulau Jawa dengan TPT sebesar 5,92%, sedangkan TPT terendah terjadi di Pulau Bali dan Pulau NTT sebesar 3,03 %. Sementara di Pulau Sumatera menjadi peringkat kedua dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,89%. Padahal Pulau Sumatera ini adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi domestik terbesar kedua setelah Pulau Jawa sebesar 21,36% pada tahun 2020. Selain itu, beberapa Provinsi di Pulau Sumatera terkenal akan kekayaan hasil alam yang melimpah seperti kelapa sawit, karet dan kopi. Namun masalah pengangguran masih menjadi polemik sampai saat ini yang harus segera diselesaikan karena tingkat pengangguran yang tinggi akan mengganggu perekonomian seperti membuat pertumbuhan ekonomi menurun akibat dari daya beli masyarakat yang rendah.

Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka



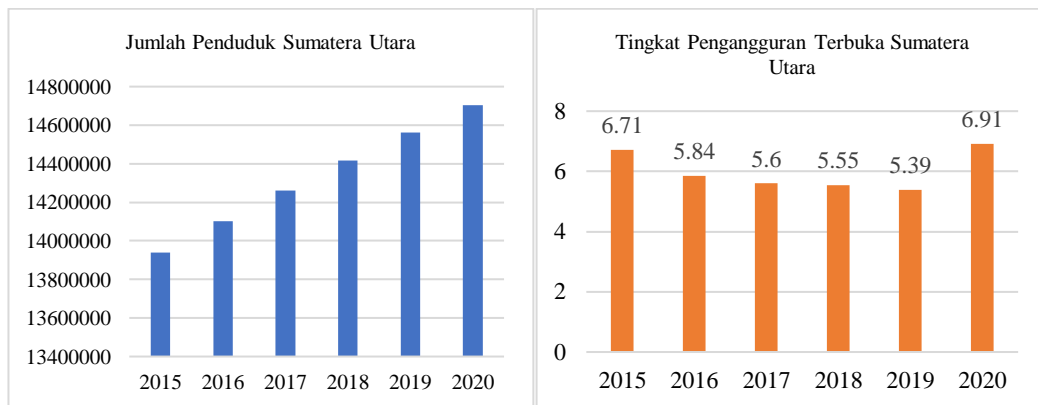
Sumber : Lab Digital Ilmu Ekonomi UPNVJ, 2022

Gambar 1 menunjukkan persentase TPT di setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi TPT pada beberapa provinsi di pulau Sumatera selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Nasional, seperti Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, dan Provinsi Riau. Sedangkan terdapat juga Provinsi yang berada dibawah TPT Nasional seperti Provinsi Bengkulu, Jambi dan Lampung. Faktor penyebab tingginya pengangguran pada Provinsi di Pulau Sumatera antara lain dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, SDM yang kualitasnya masih rendah, dan masih sedikit sedikitnya lapangan kerja.

Faktor penyebab tingginya TPT adalah banyaknya jumlah penduduk. Menurut Malthus pertumbuhan penduduk tumbuh lebih cepat dari pada

pertumbuhan sumber daya. Meningkatnya jumlah penduduk pada suatu daerah akan berdampak meningkatkan angkatan kerja. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan laju pertumbuhan lapangan kerja berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, hal ini yang akan meningkatkan TPT karena semakin menyempitnya kesempatan kerja (Muminin & R, 2017).

Gambar 2. Grafik Jumlah Penduduk



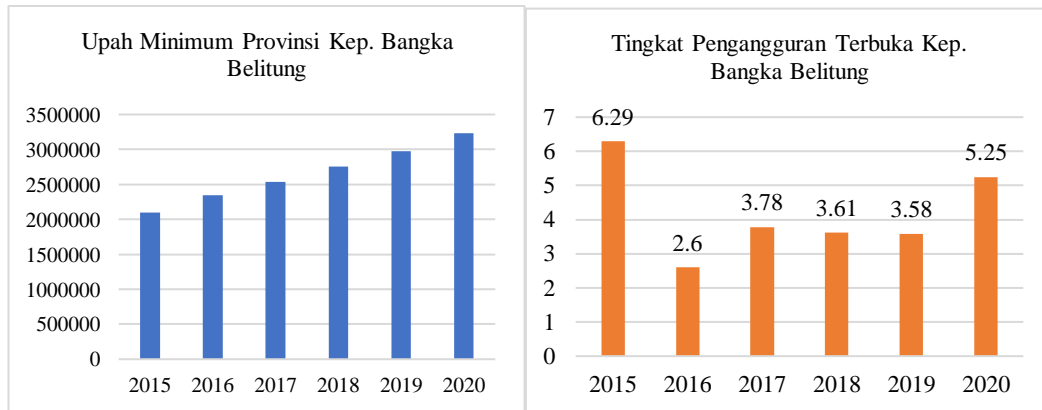
Sumber : Lab Digital Ilmu Ekonomi UPNVJ, 2022

Gambar 2 menunjukkan data peningkatan jumlah penduduk pada Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya, namun peningkatan jumlah penduduk tidak selalu berdampak terhadap meningkatnya TPT. Dalam hal ini terdapat gap yang dibuktikan pada tahun 2015-2020, jumlah penduduknya selalu mengalami peningkatan sebesar 7,32% namun terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,32%. Fenomena ini disebabkan karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 total angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan sebanyak 6.842.252 meningkat 15,6% dari tahun 2014. Selain itu juga karena PDRB perkapita Provinsi Sumatera Utara yang selalu meningkat dari tahun 2015-2020 sebesar Rp.624.725 yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap menurunnya tingkat pengangguran karena ekonomi yang tumbuh menunjukkan adanya peningkatan kegiatan dalam perekonomian seperti peningkatan produksi yang mengharuskan untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja (Muminin & R, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi TPT adalah upah minimum. Keynes mengatakan bahwa peningkatan kesempatan kerja hanya dapat terjadi ketika tingkat upah diturunkan. Korelasi antara upah dengan pengangguran adalah ketika

upah yang ditetapkan pada suatu provinsi semakin tinggi maka hal tersebut akan mengakibatkan penurunan terhadap permintaan tenaga kerja (Prawira, 2018). Hal tersebut dikarenakan semakin besar upah minimum yang diberikan akan meningkatkan beban produksi, sehingga perusahaan untuk bisa mengurangi biaya produksi akan menurunkan penyerapan tenaga kerja, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pengangguran.

Gambar 3. Grafik Upah Minimum Provinsi



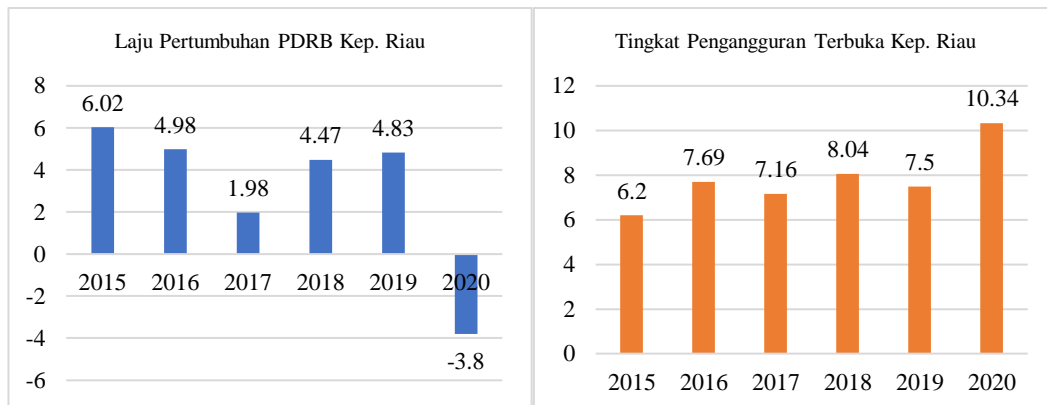
Sumber: Lab Digital Ilmu Ekonomi UPNVJ, 2022

Gambar 3 menggambarkan UMP Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selalu mengalami peningkatan. Namun meningkatnya besaran UMP tidak selalu berpengaruh terhadap meningkatnya TPT. Hal ini dibuktikan dengan adanya gap yang terjadi pada Provinsi Kep. Bangka Belitung yang merupakan Provinsi dengan upah minimum Provinsi tertinggi dari semua Provinsi di Pulau Sumatera sebesar Rp.3.240.024 pada tahun 2020. Pada tahun 2017-2019 UMP Provinsi Kep. Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar Rp.442.033, tapi TPT justru mengalami penurunan sebesar 0,20%. Fenomena ini disebabkan karena meningkatnya harga kebutuhan ekonomi seperti bahan makanan, transportasi dan pendidikan yang membuat daya tarik bagi para pencari kerja agar segera mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi TPT yaitu laju pertumbuhan PDRB. Parameter kesuksesan pembangunan ekonomi secara makro pada suatu Provinsi bisa dilihat dari peningkatan PDRB pada Provinsinya. PDRB dapat diartikan sebagai total dari barang maupun jasa yang dibuat oleh seluruh pelaku ekonomi pada periode tertentu di suatu daerah. Kondisi tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu Provinsi mengindikasikan kegiatan ekonomi Provinsi tersebut semakin baik.

Ekonomi yang terus meningkat mengartikan bahwa kondisi produksi yang juga mengalami peningkatan. Dari hal ini akan bisa membuka lapangan pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan daya serap terhadap angkatan kerja sehingga membuat pengangguran menurun (Rohmadhoni, Faizah, & Afifah, 2018). Hal ini sejalan dengan pendapat Arthur Melvin Okun yang mengatakan pertumbuhan PDRB akan menekan angka pengangguran.

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

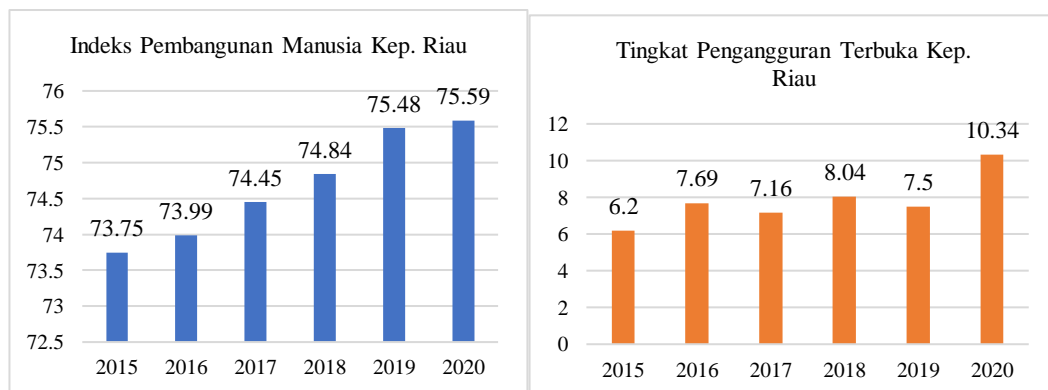


Sumber: Lab Digital Ilmu Ekonomi UPNVJ, 2022

Pada gambar 4 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB yang berfluktuasi pada Provinsi Kepulauan Riau, namun peningkatan laju pertumbuhan PDRB tidak selalu berpengaruh positif terhadap TPT. Hal ini membuktikan adanya gap seperti yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi dengan PDRB perkapita terbesar di Pulau Sumatera. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 4,47%. Namun peningkatan laju pertumbuhan PDRB ini tidak diikuti dengan terjadinya penurunan TPT dikarenakan pertumbuhan ekonomi berorientasi ke padat modal. Dimana kegiatannya menginginkan peningkatan output yang lebih besar, namun tidak bisa menyerap tenaga kerja yang banyak karena lebih memilih menggunakan mesin. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada padat karya yang lebih menggunakan tenaga kerja dibandingkan mesin, sehingga pengangguran akan tetap meningkat karena kurang dibutuhkannya tenaga kerja. Sejalan dengan pernyataan dari teori pertumbuhan ekonomi bahwa pengangguran akan tetap meningkat jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan peningkatan kapasitas produksi (Geli, Harsono, & Widiawati, 2021).

Selanjutnya, indeks pembangunan manusia (IPM) juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi TPT. Adanya korelasi antara TPT dengan IPM dijelaskan oleh Todaro dalam buku “*Economic Development*” yang menjelaskan perlunya peran dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas manusia dengan meningkatkan modal manusia. Melalui peningkatan pada dimensi pendidikan diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari pengetahuan maupun keterampilan seseorang yang bertambah, sehingga menjadi dorongan agar meningkatkan kapasitas kerjanya. Pekerja dengan tingkat produktif yang tinggi akan membuat perusahaan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga bertambahnya SDM berkualitas akan berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja, sehingga menurunkan TPT (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

Gambar 5. Grafik Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Lab Digital Ilmu Ekonomi UPNVJ, 2022

Gambar 5 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kep. Riau yang selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, meningkatnya IPM tidak selalu berdampak terhadap menurunnya TPT, hal ini bisa dilihat pada tahun 2015 dan 2017, pada 2015 indeks pembangunan manusia Provinsi Kep. Riau meningkat sebesar 0,32% namun TPT mengalami peningkatan sebesar 1,49% dan pada 2017 saat IPM meningkat sebesar 0,39% namun TPT mengalami peningkatan sebesar 12,3%. Fenomena meningkatnya pengangguran terbuka di Provinsi Kep. Riau disebabkan karena meningkatnya pengangguran pada tahun 2015 yang disumbangkan oleh penduduk dengan tingkat pendidikan universitas sebesar 1,83% dan tahun 2017 yang disumbangkan oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 3,79%.

Sudah terdapat beberapa penelitian yang berusaha melihat pengaruh jumlah penduduk, UMP, laju pertumbuhan PDRB dan IPM terhadap TPT. Dengan memfokuskan korelasi antar variabel tersebut dengan TPT. Beberapa penelitian tersebut diantaranya Triaggono Budi Hartanto dengan Siti Umajah Maskuri tahun 2017, Riska Garnella, Nazarudin A Wahid dan Yulindawati tahun 2020, Valentine Brahma Putri Sembiring dan Gatot Sasongko tahun 2019, Aisyah Sisnita dan Nano Prawoto tahun 2017, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan berpengaruh terhadap variabel terikat yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka.

Sejalan dengan latar belakang diatas, permasalahan pengangguran harus segera diatasi dengan pengendalian jumlah penduduk, pemberian besaran upah minimum provinsi, peningkatan laju pertumbuhan PDRB dan meningkatkan IPM agar bisa menurunkan TPT. Tetapi jika dilihat sebelumnya masih ditemukan gap dimana fenomena yang ada tidak selaras dengan teori. Sebenarnya penelitian tentang pengangguran terbuka sudah banyak dilakukan, namun jika dilihat dari lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian masih jarang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas tema tersebut dan memilih 10 Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan judul penelitian yaitu “Determinan Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Di Pulau Sumatera”.

1.2 Perumusan Masalah

Selama kurun waktu 2010-2020 TPT Provinsi di Pulau Sumatera secara keseluruhan berfluktuatif, tapi TPT pada beberapa Provinsi ditemukan lebih tinggi dari pada tingkat pengangguran nasional sebesar 7,8%. Padahal menurut BPS, Pulau Sumatera adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi domestik terbesar kedua setelah Pulau Jawa sebesar 21,36% dan menurut Kementerian Perindustrian Pulau Sumatera terdapat 33 kawasan industri yang menjadikan Pulau Sumatera berada pada peringkat dua kawasan industri terbanyak di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan pengangguran diantaranya adalah besarnya penduduk namun tidak diimbangi dengan SDM yang berkualitas yang dimana dalam hal ini kualitas SDM dapat dinilai dari nilai IPM, upah yang tinggi bisa berpengaruh terhadap pengangguran, sebab upah yang selalu meningkat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan

perusahaan, serta PDRB juga bisa berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, dikarenakan menjadi cerminan pertumbuhan ekonomi, apabila ekonomi tumbuh secara signifikan menyebabkan kapasitas produksi barang maupun jasa ikut meningkat pesat yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan daya serap tenaga kerja. Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, dibentuklah rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera?
3. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh laju produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Pada penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan manfaat, diantara:

1. Aspek Teoritis
Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap bisa memperbanyak pengetahuan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi TPT Provinsi di Pulau Sumatera, serta bisa dijadikan bahan referensi dan acuan pada penelitian lainnya yang membahas topik yang sama.
2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia dengan melihat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya pengangguran. Sehingga permasalahan ketenagakerjaan ini segera teratasi dengan cepat.

b. Bagi Peneliti

Menjadi kesempatan pembelajaran untuk bisa menganalisis pengaruh dari Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi laju pertumbuhan PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera. Sehingga peneliti dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama masa kuliah.